



Cegah Klithih, Perbanyak Kegiatan Ekstrakurikuler

JOGJA, Radar Jogja - Sebagai antisipasi awal mencegah tindak kejahatan jalanan atau *klithih* oleh kalangan remaja, upaya juga perlu dilakukan di tingkat sekolah. Sekolah-sekolah diminta memperbanyak kegiatan pengembangan diri bagi siswa agar potensi mereka bisa ter-tampung.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) DIJ Didik Wardaya mengatakan pembinaan

terhadap siswa yang dilakukan di sekolah penting dilakukan. Ini untuk mengantisipasi agar anak mendapat pendidikan yang baik dan tidak terjerumus ke dalam tindakan kejahatan.

"Pembinaan bisa dilakukan dengan cara menambah lebih banyak kegiatan ekstrakurikuler yaitu terkait pengembangan diri siswa," kata Didik, kemarin (13/4).

► *Baca Cegah... Hal 7*



SELEPAS SEKOLAH: Mengatasi klithih yang semakin meresahkan Disdikpora DIJ mengusulkan memperbanyak pengembangan diri melalui kegiatan ekstrakurikuler.

Cegah Klithih, Perbanyak Kegiatan Ekstrakurikuler

Sambungan dari hal 1

Dengan begitu, lanjut dia potensi para peserta didik bisa tertampung dan dikembangkan. Seperti halnya konsep merdeka belajar yang keberpihakan kepada siswa untuk mengembangkan potensinya di sekolah. "Bagaimana sekolah melakukan pengembangan diri kegiatan-kegiatan yang bisa menampung aktivitas dan potensi anak. Itu harus kita dorong" ujarnya.

Komunikasi dengan orang tua, tambah dia, juga penting didorong untuk mengetahui kegiatan-kegiatan anak di luar sekolah. Sebab, aktivitas anak di luar sekolah sudah menjadi tanggung jawab orang tua. "Kegiatan apa yang harus dilakukan siswa-siswa tersebut, di rumah guru wali kelas harus aktif memantau melalui komunikasi orang tua," jelasnya.

Selain itu, Disdikpora DIJ tak

membenarkan adanya geng-geng sekolah yang dapat memicu tindakan kejahatan yang berangkat dari percecokan antapelajar. Pun, keberadaan geng sekolah sejatinya tak diizinkan. "Jangan kan geng sekolah, anak-anak ke sekolah belum boleh menggunakan kendaraan (bermotor) itu sudah ada aturannya. Mereka sudah menandatangani kode etik ketika masuk ke sekolah itu," terangnya.

Praktis, sanksi menanti bagi siswa yang melanggar kode etik sekolah tersebut. Namun, sanksi tersebut tergantung berat dan ringan pelanggarannya. Pun kategori sanksi disesuaikan dengan jenis pelanggarannya. "Ya nanti berapa jumlah poin pelanggarannya kan masing-masing sudah ada. Dan itu tercatat dan terinventarisasi oleh sekolah," tambahnya.

Kendati begitu, jika kedapat-

an pelajar terlibat pelanggaran hukum di luar sekolah tak segan-segan pihaknya menyerahkan kepada proses hukum. "Tapi kalau misalnya, anak di luar sekolah kemudian terlibat pelanggaran yang melanggar hukum ya kita serahkan ke proses hukum," imbuhnya.

Sementara itu anggota DPRD DIJ Muhammad Syafi'i menilai dengan maraknya kasus *klithih* ini membuat pemerintah tertam-par. Banyak persoalan lain yang turut mendasari hingga terjadinya kasus *klithih* atau kejahatan jalanan. Tak sekadar pendekatan secara hukum. Tapi juga pendekatan lain, mulai dari kemiskinan, kesenjangan sosial dan lainnya. Dia meminta Pemprov DIJ bisa segera mencari solusi hingga ke akarnya. "Karena memang tugas pemerintah salah satunya menciptakan keadilan sosial," ungkapnya. **(wia/prg)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP 2. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga 3. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 4. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 20 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005